



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS CAHYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI**
3. NHK : **128693**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.722.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 750.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/47 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/136 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>126.300.000</b>
1. MOBIL, DAIHATSU TAFT JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MT-25 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO GT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. MOTOR, HONDA CBX 150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.300.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>164.128.000</b>
<b>D. SURAT BERTAHAP</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>27.769.674</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.040.197.674</b>



III. HUTANG

Rp. 229.272.340

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.810.925.334

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.